

IMPLICATION THE CHARACTERISTICS OF BUDGET LOCAL GOVERNMENT OF JAKARTA SELATAN ADMINISTRATION CITY

Swarmilah Hariani

UNIVERSITAS MERCUBUANA

swarmilah@mercubuana.ac.id

ABSTRACT

This study aims to look at the Characteristics of Budget Objectives Against the Performance of Local Government Agencies in South Jakarta Administrative City. The object of this research is 25 SKPD (Regional Work Unit) section of the budget in the SKPD of South Jakarta Administrative City. Using primary data spread questionnaires to 56 respondents. The analytical method used in this study is multiple linear regression analysis. The results showed participation in budgeting, clarity of budget goals and budget feedback had a positive and significant effect on the performance of local government agencies, the Budget as a budgetary financial plan as a basis for assessing performance. The budget has a performance planning role. Showing the existence of a clear budget target, it will make it easier for local government officials to prepare the budget to reach the target. Whereas budget evaluation and budget goal difficulties negatively affect the performance of regional government agencies. Budget evaluation can show the difference in the budget that is prepared and in fact. By evaluating the budget, it is known whether the performance of the agency in preparing the budget is good or not. Difficulties in budget goals indicate how tight the budget goals are and how difficult the budget goals are to be achieved. Due to the more difficult budget goals set, direct local government institutions are increasingly trying to reach the budget target.

Keywords: *Budgeting participation, clarity of budget goals, feedback, budget evaluation, difficulty of budget goals and agency performance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Objek penelitian ini adalah 25 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bagian anggaran pada SKPD Kota Administrasi Jakarta Selatan. Menggunakan data primer menyebarkan kuesioner kepada 56 responden. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi liner berganda. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan tujuan anggaran dan umpan balik anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, Anggaran sebagai rencana keuangan anggaran sebagai dasar menilai kinerja. Anggaran disusun memiliki peranan perencanaan kinerja,. Memperlihatkan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah aparat pemerintah daerah menyusun anggaran mencapai target. Sedangkan evaluasi anggaran dan kesulitan tujuan anggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Evaluasi anggaran dapat menunjukkan selisih anggaran yang disusun dan pada kenyataannya. Dengan evaluasi anggaran diketahui apakah kinerja instansi tersebut dalam menyusun anggaran sudah baik atau belum. Kesulitan tujuan anggaran menunjukkan seberapa ketat tujuan anggaran dan seberapa sulit tujuan anggaran untuk dicapai. Dikarenakan semakin sulit tujuan anggaran yang ditetapkan maka secara langsung instansi pemerintah daerah semakin berusaha mencapai target anggaran.

Kata Kunci : *Partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan tujuan anggaran umpan balik, evaluasi anggaran, kesulitan tujuan anggaran dan kinerja instansi*

PENDAHULUAN

Pergeseran sistem pengelolaan pemerintahan Republik Indonesia dari arah sentralisasi ke arah desentralisasi dalam wujud otonomi daerah yang berdasarkan pada Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berimplikasi pada tuntutan ekonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik secara nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah. Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban, maka dalam era otonomi daerah sekarang ini daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan pusat. Pemberian otonomi daerah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia.

Dampak globalisasi dan meningkatnya pengetahuan masyarakat, telah mendorong masyarakat untuk melakukan tuntutan akan adanya perubahan sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik (*Good Governance*). Kinerja dapat terlihat dari pelaksanaan pembangunannya. Pelaksanaan pembangunan harus mengarah kepada penciptaan *good governance* yang diterjemahkan sebagai "Tata kelola Pemerintahan yang baik" yang saat ini sedang menjadi tantangan bagi semua sektor pada jajaran pemerintah Republik Indonesia. Hal ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, otonomi daerah membuka peluang bagi daerah untuk memperkuat basis perekonomian daerah guna menuju era globalisasi ekonomi. Kebijakan otonomi daerah ini disambut baik oleh daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah dan kemampuan fiskal yang tinggi, namun di lain sisi kebijakan ini sulit diterima oleh beberapa daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah dikarenakan kurangnya sumber daya ekonomi. Laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia relatif masih rendah, kontribusi terbesar dari sumber penerimaan yang tercermin dalam APBD seluruh Indonesia pada tahun 2012 menunjukkan bahwa dana perimbangan masih menjadi komposisi terbesar dalam pendapatan daerah yaitu sebesar 69,0% atau Rp 380,601 triliun, sedangkan untuk PAD hanya menyumbang sebesar 20,4% atau sebesar Rp 112,720 triliun dan pendapatan lain- lain yang sah sebesar 10,6% atau sebesar Rp 58,262 triliun. Hal tersebut masih belum menggambarkan kemandirian keuangan daerah yang menjadi tujuan utama dari adanya sistem otonomi daerah. penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah daerah harus dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, demokratis, mendorong peran serta masyarakat, mewujudkan pemerataan dan keadilan serta, mampu dalam mengelola potensi dan keanekaragaman daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, karena itu kemampuan suatu daerah menggali PAD sangatlah penting karena akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan di daerah tersebut. Di samping itu, semakin besar kontribusi

Anggaran dan PAD terhadap Anggaran Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah maka semakin sedikit pula ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting di bandingkan sumber keuangan yang berasal dari luar PAD. Hal ini dikarenakan PAD dapat digunakan sesuai kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggara urusan daerah (Mardiasmo,2011).

Menurut Ismalia (2015) kinerja instansi pemerintah banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini, terutama sejak timbulnya iklim demokrasi dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Walaupun anggaran rutin dan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah semakin membengkak, nampaknya masyarakat belum puas atas kualitas jasa maupun barang yang diberikan oleh instansi pemerintah. Pengukuran tingkat kinerja instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan dalam menyerap anggaran. Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, penting bagi karyawan, khususnya bagian akuntansi di seluruh pemerintah, disediakan dengan pendidikan dan pelatihan tentang pelaksanaannya (Nurlis, 2018). Menurut (Iskandar dan Setiyawati, 2015) Faktor yang mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan adalah laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan mengikuti di Audit Dewan Republik Indonesia temuan audit, kompetensi dari akuntansi, akuntan internal dan kepemimpinan komitmen untuk pantau implementasi dari kontrol internal.

Tabel 1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2011 sampai dengan 2016

LKPD (Tahun)	Opini
2011	WTP
2012	WTP
2013	WDP
2014	WDP
2015	WDP
2016	WDP

Sumber : www.jakarta.bpk.go.id

Adapun alasan yang melatarbelakangi BPK dalam memberikan Opini WDP kepada Provinsi DKI Jakarta, karena ditemukannya permasalahan yang signifikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait aset tetap, piutang pajak dan piutang lainnya yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan. Sejumlah permasalahan yang masih ditemukan ialah sistem informasi aset yang belum mendukung pencatatan aset sesuai standar akuntansi, inventarisasi aset yang belum selesai, data kartu inventaris barang tidak informatif dan tidak valid. Permasalahan lainnya yaitu penyusutan aset tidak didukung kertas

kerja penyusutan, aset tanah yang sama dicatat pada tiga SKPD yang berbeda dan ada pula yang dicatat pada dua SKPD yang berbeda, serta aset tanah belum dicatat.

KAJIAN TEORI

Stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991), yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi.

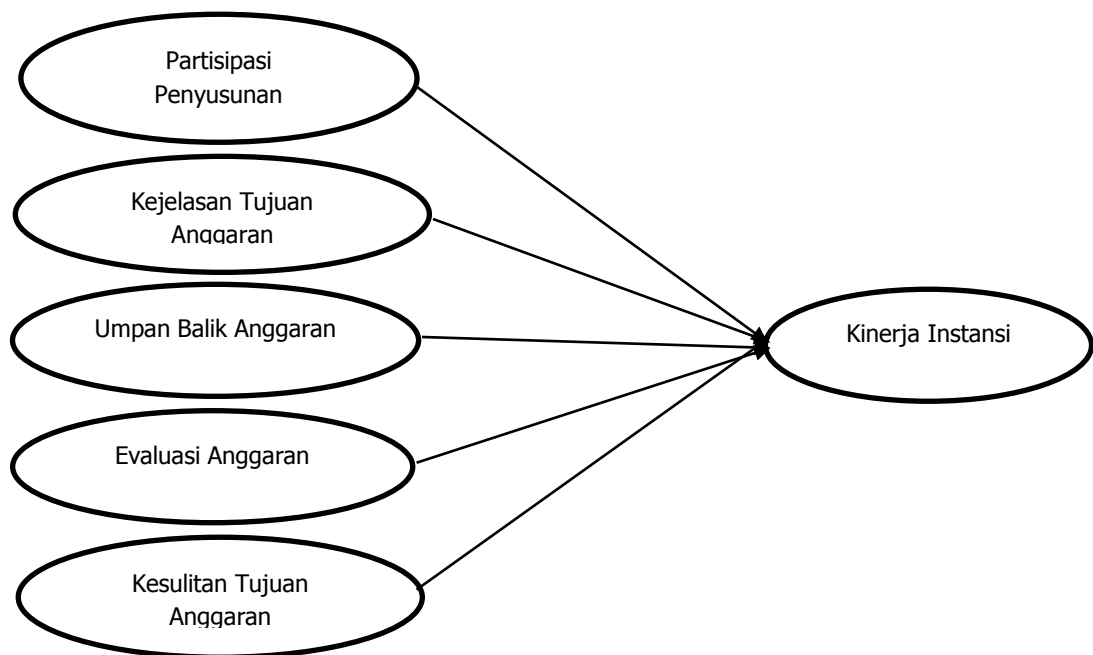
Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan *stewards*. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut. Dengan berkembangnya akuntansi dan organisasi sektor publik yang semakin kompleks membuat pemerintah daerah harus meningkatkan tuntutan akan akuntabilitas publik pada organisasi sektor publik.

Partisipasi penyusunan anggaran sebagai pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Partisipasi anggaran di dalam sektor publik terjadi pada saat pembahasan anggaran, dimana eksekutif dan legislatif saling beradu argumen dalam pembahasan RAPBD. Dimana anggaran dibuat oleh eksekutif dalam hal ini Kepala Daerah melalui usulan dari unit kerja yang disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan setelah itu Kepala Daerah bersama-sama DPRD menetapkan anggaran. Ketika suatu anggaran dirancang secara partisipatif maka karyawan akan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapai standar yang ditetapkan karena mereka ikut serta terlibat dalam proses penyusunannya yang akan berpengaruh pada tingkat kinerja (Suyanto, 2011).

Mia (2012) agar pelaksanaan anggaran berjalan secara efektif, penyusunan anggaran dan penerapannya harus memperhatikan 5 komponen karakteristik tujuan anggaran yaitu : partisipasi penyusunan anggaran (*budgetary participation*), kejelasan tujuan anggaran (*budget goal clarity*), umpan balik anggaran (*budgetary feedback*), evaluasi anggaran (*budgetary evaluation*) dan kesulitan tujuan anggaran (*budget goal difficulty*). Adanya tujuan anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target anggaran. Selanjutnya, target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai organisasi sehingga dapat memberikan suatu tingkat kepuasan. Dengan demikian karakteristik tujuan anggaran dapat berimplikasi pada kinerja aparat pemerintah daerah yang berpartisipasi baik dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran (Saukani dkk, 2015).

Wardani dan Sudaryati (2015) menjelaskan hubungan dengan karakteristik tujuan anggaran dipengaruhi oleh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan kesulitan tujuan anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan

oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran mereka. Kejelasan tujuan anggaran menunjukkan luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab. Umpan balik anggaran dapat menunjukkan mengenai tingkat pencapaian tujuan anggaran, sejauh mana aparat pemerintah daerah mengetahui hasil usahanya dalam menyusun anggaran sehingga membuat mereka dikatakan berhasil. Evaluasi anggaran menunjukkan pada sejauh mana selisih anggaran ditelusur ke masing-masing pimpinan unit kerja dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja bawahan dalam penyusunan dan penggunaan anggaran. Sedangkan kesulitan tujuan anggaran menunjukkan seberapa ketat atau seberapa sulit tujuan dapat dicapai.



Gambar 1 Model Penelitian

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah kuesioner. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan yaitu Organisasi Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang jumlahnya sebanyak 25 SKPD dan sehingga kuesioner yang kembali dan dapat diolah sebanyak 56 kuesioner yang dapat diolah. Sampel dalam penelitian ini diambil secara *purposive sampling* yaitu sampel ditentukan berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria pemilihan adalah Kepala Bagian, dan staff daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang

memiliki peran dalam proses pembuatan dan penyusunan anggaran (RKA-SKPD). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS Versi 23.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Descriptive Statistics

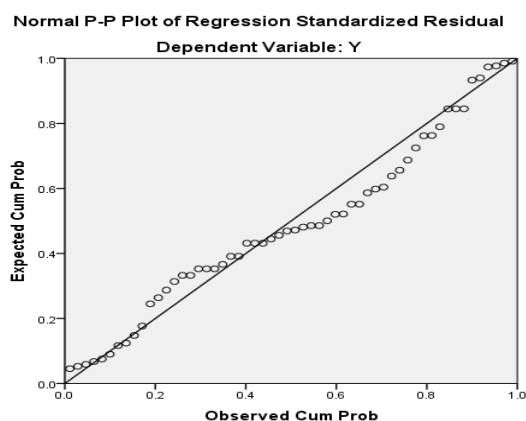
Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	56	14	25	20.04	2.551
X2	56	12	20	16.86	1.873
X3	56	8	15	11.68	1.550
X4	56	11	20	16.20	2.194
X5	56	4	17	12.50	3.021
Y	56	21	30	24.82	2.405
Valid N (listwise)	56				

Tabel 3: Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8,273	2,527		3,274	,002		
X1	-,264	,112	-,280	-2,343	,023	,494	2,023
X2	,938	,151	,730	6,207	,000	,508	1,967
X3	,438	,162	,283	2,702	,009	,643	1,554
X4	,130	,117	,119	1,112	,271	,617	1,621
X5	-,096	,071	-,121	-1,352	,182	,881	1,135

a. Dependent Variable: Y

Menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas dari enam model uji memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* lebih kecil atau kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 2 di atas menunjukkan adanya titik-titik (data) yang tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik tersebut mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model-model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas berdasarkan analisis grafik normal *probability plot*.

Tabel 4. Hasil Uji *Glejser*

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,273	2,527		3,274	,002
X1	-,264	,112	-,280	-2,343	,023
X2	,938	,151	,730	6,207	,000
X3	,438	,162	,283	2,702	,009
X4	,130	,117	,119	1,112	,271
X5	-,096	,071	-,121	-1,352	,182

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, dapat dilihat tidak ada variabel yang signifikan dalam regresi dengan variabel Absut. Hal ini terlihat dari tingkat signifikansi lebih besar dari nilai *alpha* 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.805 ^a	.648	.613	1.496

a. Predictors: (Constant), X5, X3, X2, X4, X1

b. Dependent Variable: Y

Besarnya Adjusted R Square adalah 0,613. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variable Partisipasi, Kejelasan Tujuan, Umpan Balik, Evaluasi, Kesulitan Tujuan adalah sebesar 61,3% sedangkan 51,3% ditentukan oleh faktor lain di luar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Tabel 6. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	206.336	5	41.267	18.443	.000 ^b
Residual	111.878	50	2.238		
Total	318.214	55			

Hasil regresi menunjukkan bahwa F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} yaitu $18,443 >$ atau nilai signifikan $0,000 < \alpha 0,05$. Hal tersebut menandakan model regresi dapat memprediksi bahwa partisipasi, kejelasan tujuan, umpan balik, evaluasi, kesulitan tujuan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,273	2,527		3,274	,002
X1	-,264	,112	-,280	-2,343	,023
X2	,938	,151	,730	6,207	,000
X3	,438	,162	,283	2,702	,009
X4	,130	,117	,119	1,112	,271
X5	-,096	,071	-,121	-1,352	,182

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan data tabel tersebut diatas, dapat dilihat hasil uji hipotesis, sebagai berikut:

Pengujian Hipotesis Pertama

Dilakukan dengan membandingkan nilai dengan serta melihat nilai signifikannya. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha$ 0,05. Nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ adalah 1,669. Untuk variabel partisipasi penyusunan anggaran nilai t_{hitung} adalah 2,343 atau nilai sig adalah 0.023. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{tabel} > t_{hitung}$, yaitu $1,669 > -2,343$ atau nilai signifikansi $0,023 < \alpha$ 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, sehingga H1 dalam penelitian ini diterima atau H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan partisipasi penyusunan anggaran. Penelitian ini mendukung (Gunawan dan Santioso, 2015; Wicaksono, 2016; Pratikyo dan Suprpti, 2016) hasil penelitian secara parsial menunjukkan sumber partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Artinya hal ini terjadi karena anggaran merupakan pernyataan mengenai apa yang diharapkan dalam periode tertentu pada masa yang akan datang. Sebagai rencana keuangan anggaran berfungsi sebagai dasar untuk menilai kinerja. Anggaran yang telah disusun memiliki peranan sebagai perencanaan dan sebagai kriteria kinerja, yaitu anggaran dipakai sebagai sistem pengendalian untuk mengukur kinerja manajerial. Kunci keberhasilan dari kinerja yang efektif adalah apabila tujuan dari anggaran tercapai dan partisipasi dari bawahan memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan tersebut. Hasil penelitian ini menolak Penelitian Hariani (2018) Partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota Administrasi Jakarta Barat. Ini berarti bahwa penurunan atas partisipasi aparat Pemda dalam pembuatan anggaran maka kinerja aparat Pemda juga akan turun. Sebaliknya, jika partisipasi aparat Pemda dalam pembuatan anggaran meningkat maka kinerja aparat Pemda juga akan meningkat.

Pengujian Hipotesis Kedua

Dilakukan dengan membandingkan nilai dengan serta melihat nilai signifikannya. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha$ 0,05. Nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ adalah 1,669. Untuk variabel kejelasan tujuan anggaran t_{hitung} adalah 6,207 dan nilai sig adalah 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $6,207 > 1,669$ atau nilai signifikansi $0,000 < \alpha$ 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan tujuan anggaran (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, sehingga H2 dalam penelitian ini diterima atau H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Kondisi ini memperlihatkan bahwa adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target-target anggaran yang telah ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari aparat pemerintah daerah akan berimplikasi pada komitmen untuk bertanggung jawab terhadap penyusunan anggaran tersebut. Dengan demikian, semakin jelas sasaran anggaran aparat pemerintah daerah dan dengan didorong oleh komitmen yang tinggi, akan mengurangi senjangan anggaran pemerintah daerah. Ketidaktepatan sasaran anggaran akan membuat ketidakpuasan dalam bekerja, implikasinya pada penurunan kinerja yang berarti juga penurunan akuntabilitas kinerja organisasi (Suhartono dan Mochammad, 2006).

Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu Anjarwati (2012) dan Arifin W. (2012). Kejelasan tujuan anggaran menunjukkan seberapa spesifik dan seberapa jelas tujuan anggaran yang disusun. Apabila anggaran memiliki tujuan yang jelas maka pencapaian tujuan semakin jelas sehingga mempengaruhi kinerja aparat dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kejelasan tujuan anggaran menyebabkan aparat pemerintah daerah semakin mengerti target-target yang akan dicapai di masa yang akan datang. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kejelasan tujuan anggaran terhadap kinerja aparat Pemda, ini berarti bahwa semakin jelas kejelasan tujuan anggaran dalam penyusunan anggaran maka semakin tinggi kinerja aparat Pemda dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sebaliknya, jika kejelasan tujuan anggaran kurang jelas maka kinerja aparat Pemda juga akan turun.

Pengujian Hipotesis Ketiga

Dilakukan dengan membandingkan nilai dengan serta melihat nilai signifikannya. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha$ 0,05. Nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ adalah 1,669. Untuk variabel umpan balik anggaran nilai t_{hitung} adalah 2,702 atau nilai sig adalah 0.009. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2,702 > 1,669$ dan nilai signifikansi $0,009 < \alpha$ 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa umpan balik anggaran (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, sehingga H3 dalam penelitian ini diterima atau H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurlalahayati (2017). Umpan balik anggaran menunjukkan hasil atau sejauh mana tujuan anggaran dapat dicapai. Karena umpan balik anggaran dapat menunjukkan seberapa efektif kinerja aparat dalam merealisasikan anggaran. Dengan adanya umpan balik anggaran maka dapat diketahui seberapa besar kinerja aparat dalam tanggung jawabnya merealisasikan anggaran yang telah disusun. Diharapkan umpan balik anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Pengujian Hipotesis Keempat

Dilakukan dengan membandingkan nilai dengan serta melihat nilai signifikannya. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha$ 0,05. Nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ adalah 1,669. Untuk variabel evaluasi anggaran nilai t_{hitung} adalah 1,122 atau nilai sig adalah 0,271. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{tabel} > t_{hitung}$, yaitu $1,669 > 1,112$ dan nilai signifikansi $0,271 > \alpha$ 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh negative terhadap kinerja instansi pemerintahan daerah. Evaluasi anggaran dapat menunjukkan selisih anggaran yang disusun dan pada kenyataannya. Dengan evaluasi anggaran dapat diketahui apakah kinerja aparat tersebut dalam menyusun anggaran sudah baik atau belum. Sehingga evaluasi anggaran dapat digunakan untuk evaluasi kinerja, karena evaluasi anggaran dapat digunakan untuk evaluasi kinerja diharapkan secara langsung evaluasi anggaran dapat mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil dalam penelitian ini

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat Pemda. Hal ini berarti bahwa evaluasi anggaran yang dilakukan pada Pemerintahan daerah belum efektif dalam arti evaluasi anggaran tidak dapat mengungkap sejauh mana pertanggungjawaban aparat dalam melaksanakan tugasnya sehingga evaluasi anggaran tidak dapat mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Sudaryati (2015) dengan judul Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Penujian Hipotesis Kelima

Dilakukan dengan membandingkan nilai dengan serta melihat nilai signifikannya. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha$ 0,05. Nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ adalah 1,669. Untuk variabel kesulitan tujuan anggaran nilai t_{hitung} adalah -1,352 atau nilai sig adalah 0.182. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{tabel} > t_{hitung}$, yaitu $1,669 > 1,352$ dan nilai signifikansi $0,182 > \alpha$ 0,05. Kesulitan tujuan anggaran menunjukkan seberapa ketat tujuan anggaran dan seberapa sulit tujuan anggaran untuk dicapai. Dikarenakan semakin sulit tujuan anggaran yang ditetapkan maka secara langsung aparat pemerintah daerah semakin berusaha untuk mencapai target anggaran. Tujuan anggaran yang sulit akan menimbulkan tekanan pada aparat dan memotivasi aparat sehingga diharapkan akan meningkatkan kinerja aparat daerah. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kesulitan tujuan anggaran terhadap kinerja aparat Pemda. Kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja, hal tersebut dikarenakan rendahnya persepsi karyawan tentang kesulitan tujuan anggaran, sehingga sulit atau tidaknya tujuan anggaran tidak dapat meningkatkan motivasi atau mempengaruhi kinerja aparat pemda dalam pelaksanaan pencapaian tujuan anggaran. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriani dkk (2016) di Kota Pekanbaru, Adriadiva (2015) di SKPD Kabupaten Kampar, Wardani & Sudaryati (2015) di Kabupaten Banjarnegara dan Pattinaja (2015) di SKPD Provinsi Maluku.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan tujuan anggaran dan umpan balik anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, Anggaran sebagai rencana keuangan anggaran berfungsi sebagai dasar untuk menilai kinerja. Anggaran yang telah disusun memiliki peranan sebagai perencanaan kinerja. Memperlihatkan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah aparat pemerintah daerah menyusun anggaran untuk mencapai target.
2. Sedangkan evaluasi anggaran dan kesulitan tujuan anggaran berpengaruh negative terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Evaluasi anggaran dapat menunjukkan selisih anggaran yang disusun dan pada kenyataannya. Dengan evaluasi anggaran dapat diketahui apakah kinerja aparat tersebut dalam menyusun anggaran sudah baik atau belum. Kesulitan tujuan anggaran

menunjukkan seberapa ketat tujuan anggaran dan seberapa sulit tujuan anggaran untuk dicapai. Dikarenakan semakin sulit tujuan anggaran yang ditetapkan maka secara langsung aparat pemerintah daerah semakin berusaha untuk mencapai target anggaran.

3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan agar menambahkan variabel bebas terhadap kinerja aparat pemerintah daerah karena masih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja dan melakukan teknik wawancara langsung ke responden kepada bagian keuangan di Pemerintahan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya Christianto Gunawan dan Linda Santioso (2015). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Organisasi Dan Motivasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Jakarta dan Tangerang). *Jurnal Akuntansi*/Volume XIX, No. 01, Januari 2015: 144-159.
- Apriani, Aulia., M. Rasuli., Taufik, Taufeni. (2016). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kota Pekanbaru Dengan Sikap Aparat Pemerintah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi FE Universitas Riau*, Vol. 4, No. 2.
- Anjarwati, Mei. (2012). "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap AKIP". *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.
- Ayu Nuari Dita Pratikyo dan Sri Suprpti (2016). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Teknologi Informasi, Dan Kualitas Informasi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Kabupaten Pati). *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* ISSN: 2302-2752, Vol. 5 No. 1, 2016.
- Beny Arifin W. (2012) Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi & Investasi* Vol. 13 No. 1, halaman: 15-27, Januari 2012.
- Della Adriadiva (2015). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kampar). *Jom FEKON FE Universitas Riau*, vol. 2, No. 2.2015.
- Darise, Nurlan. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16: 49-64.
- Galih Wicaksono (2016). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Pada Sekolah Menengah Negeri di Tegal. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* Volume 6 (2), Oktober 2016 P-ISSN: 2087-2038; E-ISSN:2461-1182.
- Iskandar. Diah dan Setiyawati. Hari (2015). The Effect of Internal Accountants' Competence on the Quality of Financial Reporting and the Impact on the Financial Accountability. *International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR)* Volume 3, Issue 5, May 2015, PP 55-64 ISSN 2349-0330 (Print) & ISSN 2349-0349 (Online).
- Ismalia, Haryanti. (2015). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kampar). *Jom FEKON FE Universitas Riau*, Vol. 2, No. 2.

- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mia, Milayanti. (2012). Pengaruh Budgetary Goal Characteristics Terhadap Sikap Aparat Dalam Menilai Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya). *Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan* Vol. 2, No. 1.
- Nurlelahayati, Mirna Indriani, Fadli Syam BZ (2017). Pengaruh Umpan Balik Anggaran, Evaluasi Anggaran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Volume 3 Nomor 2, September 2017. ISSN. 2502-6976.
- Nurlis. (2018). *The Effect of The Government Accounting Standards Implementation and Apparatus Competency on the Quality of the Local Government Financial Reporting (Case Study at Klaten District Government)*. *Research Journal of Finance and Accounting* ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847. Vol.9, No.8, 2018.
- Pattinaja, Elna M. (2015). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Pada SKPD Provinsi Maluku. *Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi Ambon Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura*, Vol. 9, No. 2.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Saukani, M. Rasuli & Darlis, Edfan. (2015). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal SORO7 LPPM FE Universitas Riau*, Vol. 10, No. 2.
- Suhartono, Ehrmann; Solichin, Mochammad. (2006). "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi". *SNA 9 Padang*.
- Suyanto, Bagong. (2011). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Swarmilah Hariani dan Veny. (2018). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran, Dan Kesulitan Pencapaian Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Walikota Jakarta Barat). *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*. Vol. 11 No.2 Agustus 2018.
- Wardani, Alfian Sapta & Sudaryati, Dwi. (2015). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis FE UPN Veteran Yogyakarta*, Vol. 16, No. 01.
- www.jakarta.bpk.go.id